

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

1. Deskripsi Data

Objek dalam penelitian ini adalah berada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dengan menggunakan Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai populasi dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari OPD yaitu berjumlah 38 OPD Kabupaten Bantul yang terdiri dari Sekretariat Daerah (10), Dinas (19), Badan (6), Kantor (2) dan Sekretariat DPRD (1) yang dimana hanya diambil perwakilan dari masing-masing OPD Kabupaten Bantul yaitu hanya Kepala Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan kepala Sekretariat DPRD dengan total sampel 38 responden. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diterima dan diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang termasuk dalam kriteria penelitian yang digunakan (*purposive sampling*).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini yaitu hanya Kepala Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan kepala Sekretariat DPRD pada masing-

masing OPD Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tanggal 25 september 2018 sampai dengan batas akhir pengambilan yakni pada tanggal 2 oktober 2018.

Dari 38 kuesioner yang disebar, 36 kuesioner yang kembali dan 2 kuesioner tidak kembali dengan tingkat pengembalian (*response rate*) yang diperoleh sebesar 94,7 % sedangkan sisanya 5,3 % tidak kembali. Hal ini dikarenakan ada salah satu OPD yang tidak dapat mengisi kuesioner tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan bidang yang di ampu sehingga tidak berhak untuk mengisi kuesioner tersebut dan ada juga kuesioner yang hilang pada saat batas waktu pengabilan kuesioner tersebut. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pengambilan kuesioner :

Tabel 4.1
Tingkat Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	38	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	36	94,7%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	2	5,3%
Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan		94,7%

Sumber : Data Primer

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yaitu menampilkan identitas responden seperti nama, jenis kelamin, umur, gelar/strata, latar belakang pendidikan serta lama bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bantul. Identitas pada penelitian ini dapat dikatakan kurang lengkap yaitu hampir sebagian dari responden tidak menyebutkan namanya dalam

kuesioner penelitian ini sehingga sebagian dari kuesioner pada kolom nama banyak yang dikosongkan atau tidak di cantumkan namanya.

Deskripsi karakteristik responden ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Data Statistik Karakteristik Responden

Keterangan	Deskripsi	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	36	
	Laki-laki	14	38,9%
	Perempuan	22	61,1%
Usia	Jumlah Responden	36	
	< 20	0	0%
	20-35	7	19,4%
	36-50	20	55,6%
	51-65	9	25%
	> 65	0	0%
Gelar/Strata	Jumlah Responden	36	
	SMA	1	2,8%
	D3	0	0%
	S1	24	66,7%
	S2	11	30,5%
	S3	0	0%
Latar Belakang Pendidikan	Jumlah Responden	36	
	Akuntansi	4	11,1%
	Manajemen	6	16,7%
	Ekonomi	6	16,7%
	Hukum	4	11,1%
	Teknik Lingkungan	0	0%
	Lainnya	16	44,4%
Lama Bekerja Di OPD	Jumlah Responden	36	
	< 1 tahun	3	8,3%
	1-5 tahun	2	5,6%
	6-10 tahun	10	27,8%
	11-20 tahun	12	33,3%
	> 20 tahun	9	25%

Sumber : Data Primer

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa dari 36 jumlah responden menunjukkan hasil bawah 61,1% adalah mayoritas responden berdominan perempuan yaitu sebanyak 22 responden dari jumlah 36 responden. Untuk karakteristik usia responden menunjukkan hasil terbanyak dengan jumlah 20 responden dengan total presentase sebesar 55,6 % menunjukkan bahwa mayoritas responden yang mengisi kuesioner berusia 36-50 tahun.

Karakteristik yang selanjutnya dilihat dari gelar atau strata yang dimiliki responden yaitu jumlah terbanyak menunjukkan bahwa 24 responden dengan presentase sebesar 66,7% adalah mayoritas bergelar S1, dengan latar belakang pendidikan terbanyak berjumlah 16 dari 36 responden dengan presentase sebesar 44,4% menunjukkan hasil latar belakang pendidikan lainnya selain pada pilihan yang tertera pada kuesioner yaitu selain akuntansi, manajemen, ekonomi, hukum, dan teknik lingkungan.

Dari jumlah 36 responden menunjukkan bahwa 12 responden dengan presentase sebesar 33,3 % menunjukkan jumlah terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian adalah memiliki masa lama bekerja 11-20 tahun. yang memiliki tingkat lama bekerja di OPD yaitu 11-20 tahun lamanya.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Berikut akan dijelaskan mengenai analisis deskriptif yang menjelaskan deskripsi data sariseluruh variabel, yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah, pengawasan DPRD, budaya organisasi serta Penerapan *good governance* yang akan diuji secara deskriptif seperti pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Aktual		
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviation
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	10 – 50	30	24 – 50	40,56	5,784
Pengelolaan Keuangan Daerah	10 – 50	30	24 – 50	40,53	6,026
Sistem Pengendalian Internal	12 – 60	42	29 – 60	46,03	6,120
Implementasi Satndar Akuntansi Pemerintah	8 – 40	24	20 – 40	32,00	4,342
Pengawasan DPRD	11 – 55	33	26 – 53	43,36	5,822
Budaya Organisasi	10 – 50	30	24 – 50	38,31	5,366
Penerapan <i>Good Governance</i>	14 – 70	35	32 – 69	55,44	7,105

Sumber : *Output SPSS V.15*

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji statistik deskriptif dapat di jelaskan sebagai berikut:

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 10 - 50 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 30. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 24 - 50 dengan mean aktual sebesar 40,56 dan standar deviasi 5,784. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja aparatur pemerintah daerah yang

terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika pengelolaan keuangan daerah memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 10 - 50 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 30. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 24-50 dengan mean aktual sebesar 40,53 dan standar deviasi 6,026. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika sistem pengendalian internal memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 12 - 60 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 42. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 29 - 60 dengan mean aktual sebesar 46,03 dan standar deviasi 6,120. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual > mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata sistem pengendalian internal yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 8 - 40 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 24. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 20 - 40

dengan mean aktual sebesar 32,00 dan standar deviasi 4,342. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata implementasi standar akuntansi pemerintah yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika pengawasan DPRD memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 11 - 55 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 33. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 26 - 53 dengan mean aktual sebesar 43,36 dan standar deviasi 5,822. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengawasan DPRD yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika budaya organisasi memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 10 - 50 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 30. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 24-50 dengan mean aktual sebesar 38,31 dan standar deviasi 5,366. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata budaya organisasi yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki kisaran teoritis nilai

jawaban antara 10 - 50 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 30. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 24-50 dengan mean aktual sebesar 40,56 dan standar deviasi 5,784. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja aparatur pemerintah daerah yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi terhadap penerapan *good governance*.

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.5 menunjukkan jika penerapan *good governance* memiliki kisaran teoritis nilai jawaban antara 14 - 70 dengan mean (rata-rata) teoritis sebesar 35. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual yaitu antara 32 - 69 dengan mean aktual sebesar 55,44 dan standar deviasi 7,105. Hasil uji menunjukkan jika mean aktual $>$ mean teoritis sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* yang terjadi di Organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul tinggi.

2. Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas berfungsi untuk mengetahui kevaliditasan kuesioner dengan menggunakan *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*, pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan valid jika telah memenuhi syarat jika nilai $KMO > Alpha$ 0,5. Berikut hasil pengujian validitas pada semua variabel (Y) penerapan *good governance*, (X1) kinerja aparatur pemerintah daerah, (X2) pengelolaan keuangan daerah, (X3) sistem

pengendalian internal, (X4) implementasi standar akuntansi pemerintah, (X5) pengawasan DPRD dan (X6) budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Instrumen

Butir pertanyaan	Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (KMO : 0,898)	Pengelolaan Keuangan Daerah (KMO : 0,827)	Sistem Pengendalian Internal (KMO : 0,886)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (KMO : 0,889)	Pengawasan DPRD (KMO : 0,899)	Budaya Organisasi (KMO : 0,887)	Penerapan Good Governance (KMO : 0,858)	Keterangan
1	.736	.825	.724	.864	.783	.898	.896	Valid
2	.794	.890	.788	.917	.778	.805	.777	Valid
3	.799	.759	.792	.916	.730	.786	.746	Valid
4	.839	.881	.755	.819	.785	.786	.833	Valid
5	.870	.872	.731	.874	.778	.860	.885	Valid
6	.832	.905	.827	.899	.688	.821	.749	Valid
7	.798	.855	.816	.818	.791	.773	.862	Valid
8	.829	.861	.828	.859	.906	.864	.827	Valid
9	.824	.892	.730	-	.931	.842	.843	Valid
10	.816	.888	.799	-	.851	.791	.872	Valid
11	-	-	.848	-	.843	-	.841	Valid
12	-	-	.848	-	-	-	.743	Valid
13	-	-	-	-	-	-	.846	Valid
14	-	-	-	-	-	-	.892	Valid

Sumber : output SPSS V.15

Pada tabel 4.3 tersebut terlihat masing-masing nilai *KMO MSA* lebih besar dari pada nilai sig 0,5 pada setiap variabel butir pertanyaan dalam penelitian ini. Sehingga nilai *KMO MSA* > 0,5 pada masing-masing butir pertanyaan pervariabel dalam penelitian ini sehingga dapat dinyatakan valid.

3. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini untuk mengukur reabilitas uji statistik menggunakan syarat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,7 maka data

dapat dikatakan reliabel (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrument dengan uji reliabilitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.941	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	.960	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	.945	Reliabel
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.953	Reliabel
Pengawasan DPRD	.946	Reliabel
Budaya organisasi	.947	Reliabel
Penerapan <i>Good Governance</i>	.965	Reliabel

Sumber : output SPSS V.15

h

Hasil uji reliabilitas dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Karena dari setiap item pertanyaan pada masing-masing variabel dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan reliable atau handal, maka hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mendapatkan data yang konsisten, sehingga hasil data dari kuesioner dalam penelitian ini layak untuk diuji lebih lanjut karena setiap item dalam pertanyaan pada penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias (Ghozali, 2006). Hasil dari uji asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak serta merupakan asumsi-asumsi bahwa setiap variabel berdistribusi normal, jika variabel tidak berdistribusi normal maka menjadi tidak valid untuk sampel yang berjumlah kecil.

Dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan *koefisien Asymp.sig(2-tailed) > Alpha 0,05* yang berarti data berdistribusi normal. Berikut tabel hasil uji normalitas :

Tabel 4.6
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03967224
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.086
	Negative	-.078
Kolmogorov-Smirnov Z		.517
Asymp. Sig. (2-tailed)		.952

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : *Output SPSS V.15*

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6, uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar 0,952 menunjukkan bahwa masing-masing variabel data

penelitian ini mempunyai nilai *Asymp.sig (2-tailed)* diatas 0,05, sehingga variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan mempunyai data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kesamaan antar variabel independen dalam satu model. Uji regresi dapat dikatakan bebas multikolineritas jika memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut tabel hasil dari uji multikolineritas :

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.576	3.113		.506	.617		
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.253	.120	.206	2.107	.044	.298	3.354
Pengelolaan Keuangan Daerah	.378	.135	.321	2.806	.009	.217	4.605
Sistem Pengendalian 1 Internal	.128	.137	.110	.937	.357	.204	4.896
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.383	.186	.234	2.060	.048	.220	4.548
Pengawasan DPRD	.430	.125	.352	3.450	.002	.272	3.670
Budaya Organisasi	-.223	.148	-.168	-	.144	.227	4.408
				1.503			

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance

Sumber : output SPSS V.15

Pada tabel 4.7 menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolineritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) secara keseluruhan < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, maka dapat

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi penelitian ini terdapat ketidaksamaan varian dari satu residual ke pengamatan lain. Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode pengujian heteroskedastisitas dengan uji *glejser* meregresi uji absolut residual dengan variabel bebas yang digunakan, dengan. Syarat agar dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika nilai $sig > Alpha$ 0,05 (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut tabel hasil uji heteroskedastisitas :

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.611	1.799		.339	.737
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	-.043	.069	-.200	-.626	.536
Pengelolaan Keuangan Daerah	-.083	.078	-.400	-	.296
1 Sistem Pengendalian Internal	.040	.079	.198	1.065	.614
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.064	.107	.223	.597	.555
Pengawasan DPRD	.077	.072	.357	1.066	.295
Budaya Organisasi	-.030	.086	-.128	-.348	.730

a. Dependent Variable: ABS_RES

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini data memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan pada variabel lebih besar dari pada 0,05 ($sig > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Uji Hipotesis dan Analisis Data (Analisis Regresi Berganda)

Tahap berikutnya setelah melakukan uji asumsi klasik dan mendapatkan hasil secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik, maka tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi dengan model analisis liner regresi berganda. Analisis liner regresi berganda dalam penelitian ini berfungsi untuk menguji pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi variabel independen terhadap satu variabel dependen, yang terdiri dari kinerja aparatur pemerintah daerah (X1), pengelolaan keuangan daerah (X2), sistem pengendalian internal (SPI) (X3), implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) (X4), pengawasan DPRD (X5), dan budaya organisasi (X6) sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu Penerapan Good Governance (Y) diukur dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,576 + 0,253X_1 + 0,378X_2 + 0,128X_3 + 0,383X_4 + 0,430X_5 + -0,223X_6 + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukan nilai konstanta adalah sebesar 1,576, jika variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal (SPI), implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP), pengawasan DPRD, dan budaya organisasi dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan, maka penerapan *good governance* akan meningkat sebesar 1,576 satuan.

Koefisien regresi pada variabel kinerja aparatur pemerintah daerah sebesar 0,253. Hal ini menunjukkan bahwa, jika variabel kinerja aparatur pemerintah daerah bertambah satu satuan maka, variabel penerapan *good governance* akan meningkat sebesar 0,253 satuan atau 25,3 % dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,378. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pengelolaan keuangan daerah bertambah satu satuan maka, variabel penerapan *good governance* akan meningkat sebesar 0,378 satuan atau 37,8 % dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel sistem pengendalian internal bertambah satu satuan maka, variabel penerapan *good governance* akan meningkat sebesar 0,128 satuan atau 12,8 % dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel implementasi standar akuntansi pemerintah sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel implementasi standar akuntansi pemerintah bertambah satu satuan maka, variabel penerapan *good governance* akan meningkat sebesar 0,383 satuan atau 38,3 % dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel pengawasan DPRD sebesar 0,430. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pengawasan DPRD bertambah

satu satuan maka, variabel penerapan *good governance* akan meningkat sebesar 0,430 satuan atau 43 % dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien regresi pada variabel budaya organisasi sebesar -0,223. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel budaya organisasi daerah bertambah satu satuan maka, variabel penerapan *good governance* akan meningkat sebesar -0,223 satuan atau -22,3 % dengan catatan variabel yang lain dianggap konstan.

kemudian akan dijelaskan uraian hasil pengujian regresi liner berganda dan *output* tabel pengujian dengan menggunakan SPSS versi 15,0 dalam bentuk *output model summary*, ANOVA (uji F) serta *output coefficient* (uji t), sebagai berikut :

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk dapat mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu dengan melihat nilai koefisien determinasi (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

Nilai *Ajusted R Square* menjelaskan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah dalam bentuk presentase, setelah itu sisanya (100% - presentase koefisien determinasi) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk. Berikut adalah tabel hasil pengujian, dapat dilihat pada tabel 4.8 :

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.958 ^a	.918	.901	2.241

a. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengawasan DPRD, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal

Sumber : Output SPSS V.15

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,901. Hal ini berarti 90,1 % variasi dari variabel penerapan *good governance* dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu kinerja aparaturpemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah, pengawasan DPRD dan budaya organisasi. Sisanya sebesar 9,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Uji F (*f-test*)

Uji F disebut juga sebagai uji simultan, yang digunakan untuk menguji dan membuktikan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan syarat dapat dikatakan berpengaruh secara bersama-sama antar variabel independen terhadap variabel dependen jika $sig F < Alpha 0,05$. Berikut tabel hasil uji nilai f yang dijelaskan melalui tabel anova :

Tabel 4.10
Uji Nilai-F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1621.280	6	270.213	53.817	.000 ^b
1 Residual	145.609	29	5.021		
Total	1766.889	35			

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance

b. Predictors: (Constant), Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengawasan DPRD, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal

Sumber : Output SPSS V.15

Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah, pengawasan DPRD dan budaya organisasi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap penerapan *good governance*.

3. Uji t (*t-test*)

Uji t atau disebut juga sebagai uji parsial berfungsi untuk menguji dan membuktikan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen secara individu. Uji t memiliki tingkat signifikansi 5% dengan kriteria penerimaan ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara parsial yaitu $sig < Alpha$ 0,05, jadi jika nilai $sig < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen

berpengaruh terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut adalah tabel 4.11 yaitu tabel hasil pengujian uji nilai t :

Tabel 4.11
Uji Nilai-t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.576	3.113		.506	.617
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.253	.120	.206	2.107	.044
Pengelolaan Keuangan Daerah	.378	.135	.321	2.806	.009
Sistem Pengendalian Internal	.128	.137	.110	.937	.357
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.383	.186	.234	2.060	.048
Pengawasan DPRD	.430	.125	.352	3.450	.002
Budaya Organisasi	-.223	.148	-.168	-	.144
				1.503	

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance

Sumber : *Output SPSS V.15*

Pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa ada hipotesis yang berpengaruh dan ada hipotesis yang tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*, yaitu bisa dilihat pada hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Uji Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,044 < 0,05 dengan koefisien sebesar 0,253. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama H₁ di di terima.

b) Uji Hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,009 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,378. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua H₂ di terima.

c) Uji Hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,357 > 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,128. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga H₃ di tolak.

d) Uji Hipotesis 4 (H₄)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,048 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,383. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat H₄ di terima.

e) Uji Hipotesis 5 (H_5)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,002 < 0,05$ dengan koefisien sebesar $0,430$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima H_5 di terima.

f) Uji Hipotesis 6 (H_6)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,144 > 0,05$ dengan koefisien sebesar $-0,223$. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ke enam H_6 di tolak.

D. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah daerah, pengawasan DPRD dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance*. berdasarkan hasil dari penelitian uji t atau uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ada variabel yang tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance* yaitu variabel sistem pengendalian internal dan budaya organisasi, serta

variabel lainnya berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

1. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah daerah Terhadap Penerapan *good governance*

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk variabel kinerja aparatur pemerintah daerah (H_1) menunjukkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, dengan demikian (H_1) diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,044 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,253.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiyayani (2017), Ruspina (2013), dan Mailoor *et al* (2017) yang menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Dimana dengan menerapkan *good governance* diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsive dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik pemerintahan yang baik (Ruspina, 2013).

Performance (kinerja) yaitu adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi dalam *strategic planning* suatu organisasi (Ruspina, 2013). Kinerja juga bisa digunakan untuk menyebut suatu prestasi atau tingkat keberhasilan

seseorang (individu) maupun tingkat keberhasilan kelompok individu, maksudnya adalah individu atau kelompok individu dikatakan berprestasi jika kinerjanya baik dan bagus.

Kinerja dapat dikatakan baik dan bagus jika memiliki suatu kriteria atau ketentuan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan dalam sebuah organisasi atau individu ditandai dengan adanya tujuan-tujuan atau target yang akan dicapai, tanpa adanya suatu tujuan atau target maka tidak ada tolok ukur untuk mencapai kinerja yang baik dan bagus. Salah satu cara menilai keberhasilan suatu kinerja adalah dengan mencatat kegagalan dalam suatu aktivitas organisasi agar dapat diukur dan dievaluasi kemudian diperbaiki.

Menurut Mailoor *et al* (2017), jika kinerja aparatur pemerintah daerah mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu serta dengan hasil kerja yang benar dan rapih serta minim kesalahan dengan sasaran kerja yang telah dibuat maka akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, produktif serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan atau target yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja dan prestasi serta ketepatan waktu dan minimnya kesalahan dapat mempengaruhi penerapan good governance.

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance*

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk pengelolaan keuangan daerah (H_2) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, dengan demikian (H_2) diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,009 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,378. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiyayani (2017), Ristanti *et al* (2014) dan Ruspina (2013) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini berarti menyatakan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka *good governance* juga akan tercapai atau terwujud dengan baik pula (Ruspina, 2013).

suatu organisasi dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan pelaporan keuangan daerah yang andal dan relevan baik dari tahap perencanaan hingga pelaporan hal ini sejalan dengan penelitian Halim (2006:30) dalam Ristanti *et al* (2014), yang menyatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan daerah adalah suatu keseluruhan

kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah.

Tiga tahapan untuk melihat hubungan sistem pengelolaan keuangan daerah guna untuk menciptakan *good governance* yang dilihat dalam segi prespektif sistem dan pengakuan akuntansi serta anggaran daerah adalah melalui : (1) tahapan perencanaan, (2) tahapan pelaksanaan dan (3) pengendalian yaitu masing-masing tahap meliputi input, proses, dan output yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar yang ada kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif baik berupa pelaporan keuangan triwulan maupun pelaporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada daerah (Ruspina, 2013).

Hal ini berarti keuangan yang dikelola dengan baik akan menjadi dasar penilaian penerapan *good governance*. Semakin baik pengelolaan laporan keuangan daerah maka penerapan *good governance* akan semakin baik pula dengan catatan suatu organisasi telah menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar dan tahapan yang ada dengan baik dan benar.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk variabel sistem pengendalian internal (H_3) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance* di Satuan Kerja Prangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, dengan demikian (H_3) ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu $0,357 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,128. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiyayani (2017), Ruspina (2013), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menyatakan bahwa OPD Kabupaten Bantul belum memenuhi sistem pengendalian internal yang memadai sehingga tidak mempengaruhi penerapan *good governance*. Jika sistem pengendalian internal tidak memadai maka sudah tentu pemerintah yang baik tidak akan terwujud.

Good governance pada saat belum terlaksana dengan baik, jika dilihat dari segi kacamata akuntansi sektor publik yaitu terdapat permasalahan utama yang menyebabkan penerapan *good governance* tidak terlaksana dengan baik hal ini karena lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah daerah, dan hal ini hampir dialami oleh seluruh pemerintah daerah (Ruspina, 2013). Hal ini kemungkinan disebabkan karena terdapat beberapa indikator sistem pengendalian

internal yang belum sepenuhnya terpenuhi atau terlaksana dengan baik.

Sistem pengendalian internal memiliki lima elemen yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran sistem pengendalian internal telah terpenuhi agar terlaksana penerapan *good governance* yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi serta (5) pemantauan. Sistem pengendalian internal dikatakan efektif apabila kelima elemen tersebut berjalan dengan baik, jika sistem pengendalian internal efektif maka pelaksanaan pemerintah akan berjalan dengan baik (Ruspina, 2013).

Dari hasil total capaian responden menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum dilakukan atau dilaksanakan secara maksimal, hal ini ditandai dengan nilai capaian sistem pengendalian internal yang diperoleh masih belum maksimal. Sehingga diperlukan pengoptimalan seluruh indikator sistem pengendalian internal, agar dapat mendukung terbentuknya penerapan *good governance*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh Dhiyayani (2017), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa OPD Kabupaten Bantul belum memenuhi sistem pengendalian internal yang memadai sehingga tidak mempengaruhi penerapan *good governance*.

4. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk implementasi standar akuntansi pemerintah (H_4) menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, dengan demikian (H_4) diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,048 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,383. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhiyayani (2017) dan Mailoor *et al* (2017) yang menyatakan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Jika prosedur dan sistem yang digunakan dalam suatu organisasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), dan informasi laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten maka akan terwujud implementasi standar akuntansi pemerintah yang baik sehingga penerapan *good governance* juga akan tercapai dengan baik (Mailoor, 2017).

Dengan adanya implementasi standar akuntansi pemerintah, pemerintah daerah mampu menerapkan *good governance* di Kabupaten Bantul. Hal ini selaras dengan hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini. Hal ini selaras dengan penelitian Dhiyayani (2017),

yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah membantu pemerintah mempengaruhi penerapan *good governance*.

5. Pengaruh Pengawasan DPRD Terhadap Penerapan Good Governance

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk pengawasan DPRD (H₅) menunjukkan bahwa pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, dengan demikian (H₅) diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,002 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,430. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibie (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Semakin baik pengawasan DPRD maka semakin baik pula penerapan *good governance*.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada saat penyusunan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2004). Salah satu fungsi pokok DPRD adalah melakukan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan DPRD maka *good governance* tidak dapat terwujud, karena anggaran rawan terjadi penyelewengan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak akan berlangsung sesuai dengan rencana, aturan serta tujuan yang ditetapkan (Habibie, 2013).

6. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Governance*

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk variabel budaya organisasi (H_6) menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance* di Satuan Kerja Prangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, dengan demikian (H_6) ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu $0,144 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,223$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailoor *et al*(2017) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hasil dari penelitian ini tidak menunjukkan bahwa aparat pemerintah yang mematuhi budaya organisasi akan meningkatkan penerapan *good governance*. Dengan demikian hasil tersebut tidak selaras dengan hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian Mailoor (2017), menyatakan bahwa diperolehnya hasil yang tidak signifikan dengan hipotesis dikarenakan dapat dijelaskan melalui beberapa fenomena. Fenomena tersebut terkait dengan karakteristik budaya aparatur pemerintah daerah yang disebabkan karena adanya latar belakang umur, pendidikan, masa kerja, pengalaman kerja, dan posisi jabatan yang berbeda dari setiap responden yang mengisi kuesioner, sehingga persepsi budaya yang muncul adalah budaya individu pribadi dan tidak muncul budaya

organisasi yang kuat dan dominan, sehingga budaya organisasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.